

SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN USAHA BATAKO DI KECAMATAN
PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SINTIA GRESI OUTMI
1210111029

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H

Anton Rosari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PEMBERIAN IZIN USAHA BATAKO DI KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

(Sintia Gresi Qutmi, 1210111029, Fakultas Hukum Universitas Andalas 62
halaman 2018)

ABSTRAK

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, termasuk untuk mengatur dan mengawasi masalah perizinan usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kabupaten Pasaman Barat, pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut diperlukannya pengaturan mengenai perizinan agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan disekitar tempat usaha/kegiatan batak. Dalam peraturan mengenai izin usaha tersebut masih banyaknya kegiatan usaha batak di daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak memiliki izin usaha, tercatat pada badan Penanaman Modal Pasaman Barat setidaknya 28 Usaha Batak tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin usaha batak di Kabupaten Pasaman Barat ? (2) Kendala – kendala yang terdapat dalam pemberian izin usaha batak di Kabupaten Pasaman Barat ?. Metode yang digunakan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap Pemerintah Daerah Pasaman Barat dan Pelaku usaha. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemberian izin usaha batak di Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku namun dalam pengawasannya masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Hal ini karena kurangnya pengawasan serta sanksi yang tegas oleh pemerintah terkait penertiban usaha batak yang ilegal yang masih berkembang sampai saat sekarang ini. Dengan demikian, agar tercapainya tujuan bersama diharapkan pemerintah dapat menegakkan peraturan dengan tegas dan sesuai dengan ketentuan yang ada serta dapat memberikan bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam memperlancarkan kegiatan usahanya (batak) seperti administrasi, transportasi sarana dan prasarana yang dirasa perlu dan sebagainya.

Kata Kunci :Kebijakan Pemerintah, Izin Gangguan.